



MENINGKATKAN PROFESIONALITAS KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA
MELALUI PEMANTAPAN MEDIA MASSA

Oleh
Rudy Cahya Kurniawan
Akademi Kepolisian
Email: rudycahyaundip@gmail.com

Article History:

Received: 07-09-2022

Revised: 15-09-2022

Accepted: 24-10-2022

Keywords:

Peningkatan;

Profesionalitas;

Kepolisian Republik

Indonesia; Pemantapan

Media Massa.

***Abstract:** Beberapa persoalan menjadikan potret Polri secara umum masih terlihat buram di mata masyarakat maupun media massa yang semestinya menjadi perhatian serius untuk segera dibenahi. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui peningkatan profesionalisme Polri melalui pemantapan media massa beserta hambatan yang dihadapi. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris dengan spesifikasi deskriptif analitis. Analisis data dengan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan: Peningkatan profesionalisme Polri melalui pemantapan media massa dapat dilakukan dengan cara membentuk kemitraan dengan berbagai media, membangun reputasi terhadap media, memberikan informasi yang baik, kerjasama dalam penyampaian materi informasi, menyediakan fasilitas verifikasi, kerjasama dalam penyampaian materi informasi. Hambatan yang dihadapi adalah terjadi pergeseran jadwal, terbatasnya sarana prasarana, kekurangan SDM, padat nya jadwal, minim anggaran, kesulitan dalam menjangkau informasi dari semua Satuan Kerja yang jumlahnya banyak.*

© 2022 SWARNA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat

PENDAHULUAN

Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dalam perannya sebagai salah satu institusi penegak hukum akan selalu menghadapi tantangan, baik tantangan berat maupun ringan dalam tugasnya. Tantangan tugas Polri bukan saja pada level institusi pusat maupun wilayah, individu anggota perwira berpangkat tinggi, menengah, maupun anggota berpangkat rendah, namun juga terjadi di tingkat lapangan saat di mana anggota Polri berhadapan langsung sebagai pelayan dan pelindung masyarakat. Polisi dan masyarakat merupakan dua elemen yang saling membutuhkan, sebab polisi lahir dan berasal dari masyarakat. Sementara di sisi lain, masyarakat dibutuhkan polisi karena di sanalah ladang pekerjaannya. Tugas polisi apabila dibandingkan dengan penegak hukum yang lain, sangatlah berat dan membutuhkan dukungan dari berbagai pihak. Anton Tabah dan Satjipto Raharjo mengatakan bahwa prestasi kerja polisi merupakan fungsi dari keadaan sekelilingnya. Ini menunjukkan bahwa ada suatu ikatan yang erat antara tugas polisi

dengan lingkungan, masyarakat dan bangsanya.¹ Harapan masyarakat tentang polisi dalam melaksanakan tugasnya sangat dinantikan oleh publik, sehingga polisi harus memperhatikan kinerjanya, apakah yang mereka lakukan sudah memenuhi harapan masyarakat. Masyarakat merupakan tempat lahan yang sangat potensial bagi polisi untuk mengabdikan, dan ini merupakan suatu amanah atau tongkat estafet yang ditinggalkan oleh para pejuang-pejuang zaman dahulu. Maka seharusnya sebagai polisi harus menjadi yang terbaik di antara para penegak hukum yang ada di negeri yang kita cintai ini.

Profesi tidak hanya kata yang berarti pekerjaan, namun secara disiplin ilmu profesi berkaitan dengan pekerjaan yang membutuhkan keahlian dan spesialisasi tertentu. Kemudian, profesi berkembang menjadi kata profesional yang berarti hal yang berkaitan dengan profesi, dimana seseorang telah ahli pada profesi yang dikerjakannya. Profesional merupakan suatu perbuatan atau kinerja kepolisian dalam menjalankan tugas yang sesuai SOP Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sikap profesional, pada dasarnya adalah mereka yang memiliki keahlian dan keterampilan serta sikap mental yang terpuji, yang juga dapat menjamin bahwa segala sesuatunya dari perbuatan dan pekerjaannya berada dalam kondisi yang terbaik dari penilaian semua pihak.² Menurut Sullivan, pakar ilmu kepolisian kriminolog AS, untuk mengukur profesionalisme dapat dilihat dari tiga parameter, yaitu motivasi, pendidikan, dan penghasilan. Agar memperoleh aparat penegak hukum (inklusif polisi) yang baik, haruslah dipenuhi prinsip *Well MES*, yaitu *well motivation* (motivasi bagus), *Well education* (pendidikan baik), dan *well salary* (gaji layak).³

Media massa merupakan media komunikasi massa yang merupakan produk dari pers yang menyajikan informasi kepada masyarakat mengenai fenomena-fenomena atau gejala-gejala sosial yang terjadi di tengah-tengah kehidupan masyarakat sendiri, baik yang menyangkut masalah sosial, ekonomi, budaya, politik, maupun berbagai sektor kehidupan masyarakat lainnya.⁴ Frank Jefkins menjelaskan prinsip umum untuk membina hubungan pers yang baik sebagai berikut :⁵ **Pertama**, *By serving the media* (memahami dan melayani media). Yaitu memberikan pelayanan kepada media. Misalnya *Public Relations* harus mampu menciptakan kerjasama dengan media. *Public Relations* harus menciptakan suatu hubungan timbal-balik. **Kedua**, *By establishing a reputations for reliability* (membangun reputasi sebagai orang yang dapat dipercaya). Yaitu menegakkan suatu reputasi agar dapat dipercaya. Misalnya selalu menyiapkan bahan-bahan informasi akurat dimana dan kapan saja diminta. Wartawan selalu ingin tahu sumber berita paling baik untuk mendapatkan informasi yang akurat dan hubungan timbal balik terjalin semakin erat. **Ketiga**, *By supplying good copy* (menyediakan salinan yang baik). Yaitu memasok naskah informasi yang baik. Misalnya memberikan naskah yang baik, menarik perhatian, pengadaan gambar atau foto, pembuatan teks gambar atau foto yang baik. Juga, pengiriman *news release* sehingga hanya sedikit memerlukan penulisan ulang atau menyunting. **Keempat**, *By cooperations in providing material*

¹ Satjipto Raharjo dan Anton Tabah, *Polisi, Pelaku dan Pemikir*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993), hal 24.

² Ahmad Hadadi, Analisis Pengaruh Profesionalisme Birokrasi dan Pemberian Motivasi Terhadap Kinerja Pegawai Dinas Peikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Barat. 2013, hal. 4

³ Kunarto, *Merenungi Kritik Terhadap Polri*, (Jakarta: Cipta Tunggal, 1995), hal.106.

⁴ West, Richard dan Lynn H Turner, *Pengantar Teori Komunikasi Edisi 3 Analisis dan Aplikasi*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2008), hal. 49.

⁵ Soleh Soemirat dan Elvinaro Ardianto, *Dasar-dasar Public Relations*, (Bandung : PT. Remaja Rosda karya, 2005), hal. 124-125.

(bekerjasama dalam penyediaan materi). Yaitu melakukan kerjasama yang baik dalam menyediakan bahan informasi. Misalnya: merancang wawancara pers dengan seseorang yang dibutuhkan pers ketika itu. *Kelima*, *By providing verification facilities* (menyediakan fasilitas verifikasi). Yaitu penyediaan fasilitas yang memadai. Misalnya, memberikan fasilitas yang dibutuhkan wartawan sewaktu menggali berita. *Keenam*, *By building personal relationship with the media* (membangun hubungan personal yang kokoh). Yaitu membangun hubungan secara personal dengan media. Hal ini yang mendasari keterbukaan dan saling menghormati profesi masing-masing.

Beberapa peneliti terdahulu telah melakukan penelitian terkait upaya meningkatkan profesionalitas Kepolisian, seperti penelitian yang dilakukan oleh Petrus Kanisius Noven Manalu pada tahun 2014 dengan judul Fungsi Kode Etik Profesi Polisi Dalam Rangka Meningkatkan Profesionalitas Kinerjanya. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa kode etik profesi polisi dapat meningkatkan profesionalitas kinerja polisi diantaranya: 1) Sosialisasi secara maksimal kepada anggota polisi baru tentang kode etik profesi dalam menjalankan tugasnya; 2) Peninjauan kerja atau terhadap par polisi lama, apakah sudah menjalankan tugasnya sesuai kode etik yang ada; serta 3) Peninjauan isi atau kandungan dalam kode etik profesi polisi, yang harus disesuaikan dengan kondisi masyarakat yang dinamis.⁶

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Karlinda Rahma Syahida pada tahun 2017 dengan judul Pembinaan Mental Polri Melalui Pembinaan Mental. Penelitian tersebut meresume buku yang ditulis oleh Muh. Yahya Agil yang berjudul Profesionalisme Polri melalui Pembinaan Mental Berbasis Dakwah dan Komunikasi di Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam penelitian ini menyimpulkan bahwa Pembinaan mental dengan menggunakan pendekatan dakwah dan komunikasi dalam penyampaian pesan atau materi pembinaan diharapkan menjadi lebih komunikatif, sehingga menimbulkan efek tertentu berupa perubahan sikap dan perilaku individu anggota Polri, sesuai dengan nilai-nilai ajaran agama yang dianut anggota binaan dan harapan masyarakat mengenai profesionalisme Polri. Selain itu, harapan dari Polri sendiri mengenai profesionalisme Polri yang terbentuk dari hasil pembinaan mental ini diharapkan nantinya berimplikasi dan memberi dampak yang baik terhadap pelayanan Polri kepada masyarakat sebagai implementasi dakwah yang dilakukan oleh Polri.⁷

Selanjutnya jurnal asing yang ditulis oleh Andrew Faull dan Brian Rose pada tahun 2012 dengan judul Professionalism and the South African Police Service: What is it and how can it help build safer communities?. Penelitian tersebut mendapatkan hasil bahwa: SAPS (*South African Police Service*), bersama dengan departemen pemerintah terkait, badan polisi metro, otoritas penegakan lalu lintas, serikat polisi serta universitas / pusat penelitian yang terlibat dengan masalah kejahatan, keselamatan dan kepolisian, mungkin mendapat manfaat dari pemantauan perkembangan seputar profesionalisme polisi yang terjadi di yurisdiksi asing. Mereka mungkin berisi pelajaran penting dan dapat dialihkan, seperti penekanan pada pekerjaan polisi berbasis pengetahuan di Inggris. Afrika Selatan berada pada posisi yang tepat untuk berkontribusi pada pengetahuan global tentang kejahatan dan keadilan, termasuk tata kelola lembaga terkait, terutama di

⁶ Petrus Kanisius Noven Manalu, *Fungsi Kode Etik Profesi Polisi Dalam Rangka Meningkatkan Profesionalitas Kinerjanya*, Jurnal, Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta (2014), hal. 1-11.

⁷ Karlinda Rahma Syahida, *Pembinaan Mental Polri Melalui Pembinaan Mental*, Indo-Islamika, Volume 7 No.1, Januari-Juni 2017, hal. 139-144, hal. 139-144.

negara transisi dan berkembang. Dengan jenis kerjasama yang tepat antara instansi dan lembaga, SAPS dapat menjadi bagian utama dari kontribusi ini.⁸

Harsya W Bactiar, salah seorang pakar ilmu kepolisian pernah menyatakan, hanya sebagian kecil personil Polri yang berfikir dan bertindak profesional. Menghadapi masalah seperti ini, menurut Bactiar, peningkatan kualitas akademis melalui pendidikan Pasca Sarjana Ilmu Kepolisian merupakan keharusan.⁹ Untuk meningkatkan keprofesionalan polisi tidak cukup dengan pendidikan SLTA untuk bintara, mereka harus memperoleh pendidikan yang lebih baik, alangkah baiknya mereka mendapat pendidikan di perguruan tinggi paling tidak tingkat diploma untuk menambah wawasan berfikir mereka dalam aktifitas sehari-hari.

Ketiga penelitian di atas mengkaji profesionalitas Kepolisian, penelitian pertama lebih ditekankan pada penerapan kode etik Polri guna meningkatkan profesionalitas, penelitian kedua ditekankan pada pembinaan mental, sedangkan penelitian ketiga kajian profesionalisme dilakukan pada SAPS (*South African Police Service*). Meski ketiga penelitian tersebut sama-sama terkait dengan profesionalitas Kepolisian, namun yang membedakan dengan penelitian ini adalah dalam penelitian ini peningkatan profesionalitas Kepolisian lebih ditekankan melalui pemantapan media massa khususnya pada Kepolisian Republik Indonesia. Media massa di zaman modern ini berperan sangat signifikan dalam hubungan antara polisi dan masyarakat. Tanpa media massa hubungan antara polisi dengan masyarakat tidak akan efektif. Terdapat beberapa persoalan yang menjadikan potret Polri secara umum masih terlihat buram di mata masyarakat maupun media massa yang semestinya menjadi perhatian serius untuk dapat segera dibenahi. Hal tersebut dilakukan guna menanggapi dan menjawab sentimen negatif yang muncul dan masih melekat di tubuh Polri sampai saat ini. Bertumpu dari hal tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui peningkatan profesionalisme Kepolisian Republik Indonesia melalui pemantapan media massa beserta hambatan-hambatan yang dihadapi dalam peningkatan profesionalisme Kepolisian Republik Indonesia melalui pemantapan media massa.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Pendekatan ini disebut juga dengan pendekatan secara sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis, yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta dan data yang dibutuhkan kemudian menuju pada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.¹⁰ Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Spesifikasi penelitian deskriptif menurut Soerjono Soekanto adalah suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin dengan manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya, serta hanya menjelaskan keadaan objek masalahnya tanpa bermaksud mengambil kesimpulan yang berlaku umum.¹¹ Penelitian ini menggunakan sumber data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan yang berbentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti, dan juga data

⁸ Andrew Faull dan Brian Rose, *Professionalism and the South African Police Service: What is it and how can it help build safer communities?*, Institute for Security Studies, Paper 240, Oktober 2012, hal. 1-21.

⁹ Kunarto, *Op.Cit.*, hal. 108.

¹⁰ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hal.16.

¹¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2006), hal. 10.

sekunder, yaitu data yang diambil dari bahan pustaka. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi pustaka. Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis data deskriptif kualitatif. Metode analisis kualitatif adalah metode yang dilakukan dengan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah data menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistensikannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari.¹²

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peningkatan Profesionalisme Kepolisian Republik Indonesia Melalui Pemantapan Media Massa

Profesi tidak hanya kata yang berarti pekerjaan, namun secara disiplin ilmu profesi berkaitan dengan pekerjaan yang membutuhkan keahlian dan spesialisasi tertentu. Kemudian, profesi berkembang menjadi kata profesional yang berarti hal yang berkaitan dengan profesi, dimana seseorang telah ahli pada profesi yang dikerjakannya. Profesional merupakan suatu perbuatan atau kinerja kepolisian dalam menjalankan tugas yang sesuai SOP Kepolisian Negara Republik Indonesia. Menurut Sullivan, pakar ilmu kepolisian kriminilog AS, untuk mengukur profesionalisme dapat dilihat dari tiga parameter, yaitu motifasi, pendidikan, dan penghasilan. Agar memperoleh aparat penegak hukum (inklusif polisi) yang baik, haruslah dipenuhi prinsip *Well MES*, yaitu *well motivation* (motivasi bagus), *Well education* (pendidikan baik), dan *well salary* (gaji layak).¹³ Sikap profesional, pada dasarnya adalah mereka yang memiliki keahlian dan keterampilan serta sikap mental yang terpuji, yang juga dapat menjamin bahwa segala sesuatunya dari perbuatan dan pekerjaannya berada dalam kondisi yang terbaik dari penilaian semua pihak.¹⁴

Pada masa pandemi covid-19 seperti sekarang ini Polri sudah bergerak cepat dengan membentuk Satgas Aman Nusa II yang merupakan bagian dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di Indonesia. Satgas Aman Nusa II terdiri atas Subsatgas Pidum, Subsatgas Ekonomi, dan Subsatgas Siber. Subsatgas Pidum (Pidana Umum) yang bertugas menindak kejahatan konvensional, seperti pencurian, penjarahan, perampokan, dan tindak pidana umum lainnya. Subsatgas Ekonomi bertugas menindak penimbunan bahan makanan dan alat kesehatan. Subsatgas Siber bertugas menindak pelaku hoaks Covid-19 melalui media terutama media online. Hal ini sejalan dengan apa yang dinyatakan oleh Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si dalam Transformasi Menuju Polri Yang Presisi dalam salah satu program prioritasnya yaitu mewujudkan pelayanan publik Polri yang terintegrasi salah satunya dilakukan melalui peningkatan integrasi teknologi dan komunikasi dengan media untuk akses layanan, informasi, pengaduan, dan partisipasi masyarakat, pemantapan komunikasi public melalui media, serta peningkatan integrasi teknologi dan komunikasi dengan media untuk akses layanan, informasi, pengaduan, dan partisipasi masyarakat.¹⁵

Dari data sebaran Covid-19 pada periode minggu terakhir Januari (Selasa, 26 Januari 2021 s.d Senin, 01 Februari 2021) dapat kita lihat bahwa tren terjadinya kasus konfirmasi positif, konfirmasi kesembuhan dan konfirmasi meninggal dunia masih

¹² Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Remaja Rosdakarya, 2010), hal. 248.

¹³ Kunarto, *Op.Cit.*, hal. 108.

¹⁴ Ahmad Hadadi, *Op.Cit.*, hal. 4

¹⁵ Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si, 2021, Transformasi Menuju Polri Yang Presisi.

fluktuatif/dinamis.¹⁶ Hal ini mengharuskan Polri agar selalu waspada akan berbagai hal yang berpotensi mengganggu keamanan serta ketertiban masyarakat khususnya pada masa pandemic covid-19. Hal ini merupakan salah satu bagian dari profesionalitas Polri. Kemudian banyaknya pemberitaan hoaks di media membuat Polri perlu melakukan pemantapan media massa.

Dalam Road Map Transformasi Menuju Polri Yang Presisi disebutkan bahwa dalam program mewujudkan pelayanan publik Polri yang terintegrasi dalam kegiatan peningkatan integrasi teknologi dan komunikasi dengan media untuk akses layanan, informasi, pengaduan, dan partisipasi masyarakat maka diperlukan beberapa aksi berikut ini: 1) Meningkatkan kerja sama Polri dan media terkait akses layanan publik; 2) Peningkatan integrasi teknologi dan komunikasi dengan media untuk akses layanan, informasi, pengaduan, dan partisipasi masyarakat; 3) Mengoptimalkan kampanye siber untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya keamanan data pribadi dan budaya etika bermedia sosial tanpa menutup ruang kreativitas; 4) Menguatkan fungsi *content creative*, *content writer*, dan *media relation* guna mengelola kegiatan kepolisian yang mengandung nilai kepublikan yang tinggi; 5) Menguatkan fungsi Humas Polri untuk menjalin kerja sama yang baik dengan media; 6) Optimalisasi *platform* media sosial Polri untuk memastikan informasi Polri sampai ke seluruh pelosok Indonesia; 7) Meningkatkan pelatihan media untuk pengembangan fungsi Humas dalam rangka penguatan publikasi Polri; dan 8) Menguatkan Media Center sebagai *media hub* bagi insan media yang melakukan peliputan di instansi Polri.

Berita-berita yang kurang tepat untuk masyarakat akan berdampak pada citra yang dibangun, sehingga dari dapat merusak reputasi citra yang ada pada instansi atau organisasi serta menghambat peningkatan profesionalisme Kepolisian Republik Indonesia. Tugas Polri bagaimana mengolah informasi itu, mengekspose ke media menyebarkan informasi, sehingga tidak adanya kekeliruan terhadap masyarakat. Polri dituntut untuk berpikir cerdas bagaimana mendongkrak citra perusahaan, instansi atau pun lembaga, informasi yang dimanfaatkan untuk menciptakan opini publik sebagai landasan mendasar terhadap masyarakat. Sehingga terciptanya hubungan timbal balik berupa citra yang positif dilaksanakan secara bersamaan, disinilah peran dari Kepolisian lewat Humas, harus menjaga agar citra kepolisian tersebut tetap mengalami kenaikan, salah satunya adalah dengan meningkatkan hubungan baik atau kemitraan dengan awak media, karena dengan peran dan fungsi media tersebut mampu menjembatani komunikasi dua arah antara kepolisian dan masyarakat.

Polri melalui Humas Polri bersama dengan unsur wartawan dari berbagai media cetak maupun elektronik baik lokal maupun nasional perlu membentuk kemitraan guna membangun sinergitas pemberian informasi kepada masyarakat secara cepat, transparan dan berkualitas. Untuk meningkatkan profesionalitas Kepolisian Republik Indonesia melalui pemantapan media massa maka upaya yang dilakukan dapat merujuk pada teori yang dikemukakan oleh Frank Jefkins dimana dalam teorinya menjelaskan tentang bagaimana menjalankan prinsip-prinsip umum untuk membina hubungan dengan media yang baik¹⁷ yaitu melalui:

Pertama, *By serving the media* atau pelayanan kepada media. Salah satu bentuk pelayanan yang dilakukan Humas Polri terhadap media yaitu dengan melakukan

¹⁶ Video Conference Kapolri dan Dengan Kapolda Dan Kapolres Terkait Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) tahun 2021

¹⁷ Ardianto, Elvinaro dkk. 2007, *Komunikasi Massa, Suatu Pengantar, Edisi Revisi*, (Bandung: Simbiosis), hal. 266.

pendekatan-pendekatan secara kekeluargaan hal ini di lakukan dalam penyampaian informasi yang dibutuhkan oleh rekan media. Namun dalam pelaksanaannya penulis mengamati dalam melakukan tahapan *servicing the media* Humas Polri hanya fokus terhadap bagaimana kegiatan berlangsung dengan baik. Sedangkan Humas Polri belum menekankan pada dampak yang dialami ketika kegiatan pelayanan kepada media dilakukan. Ardianto¹⁸ menyebutkan bahwa segala aktivitas yang berhubungan dalam lingkup *media relations* tidak terlepas dari 6 unsur kehumasan, diantaranya *press release, konferensi pers, press briefing, special event, press interview, dan press luncheon*. Hal tersebut dilakukan agar terbentuknya rasa harmonis baik dari pihak media selaku mediator untuk menyampaikan berita maupun pihak Polri yang berposisi sebagai komunikator atau sumber berita. Dalam menjaga kerjasama yang baik dengan media, Humas Polri setiap harinya menulis release dan memberikan kepada media. Release yang dibuat bisa berupa kebijakan perundang-undangan, berita mengenai Polri, maupun kegiatan yang lainnya. Selain kegiatan diatas, Humas Polri juga melakukan kerjasama dengan media-media cetak yang ada. Humas Polri juga menyediakan fasilitas dalam pelaksanaan jumpa pers, mulai dari tempat pelaksanaan hingga narasumber yang dibutuhkan oleh media.

Kedua, *By establishing a reputations for reliability* atau membangun reputasi terhadap media. Strategi yang dilakukan humas Polri sebagai upaya untuk menegakan reputasi perusahaan agar perusahaan tersebut tetap dapat dipercaya. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Kriyantono¹⁹ bahwa reputasi institusi (*institution reputation*) adalah persepsi publik atau sasaran mengenai kualitas yang dihubungkan dengan nama institusi. Sehingga segala sesuatu bentuk komunikasi yang dilakukan oleh Humas Polri akan membentuk persepsi rekan wartawan terhadap reputasi institusi Polri. Hal tersebut dapat dilihat dalam melakukan segala aktivitas program-program maupun menyiapkan informasi terhadap media Humas sangat terbuka menyampaikan informasi sesuai fakta-fakta yang terjadi dilapangan, selalu menyiapkan bahan-bahan informasi akurat dimana dan kapan saja diminta. Wartawan selalu ingin mengetahui sumber berita paling baik untuk mendapatkan informasi yang akurat dan hubungan timbal-balik terjalin semakin erat. Setiap humas baik instansi pemerintah maupun swasta tentunya memiliki tugas yang berbeda-beda dalam hal kehumasan, namun demikian humas mempunyai satu tujuan yang sama tanpa terkecuali Humas Polri. Dalam setiap aktivitas kehumasannya, Humas Polri memiliki tujuan untuk menjaga reputasi Polri agar *stakeholder* dapat terus percaya. Hal tersebut di realisasikan melalui program-program maupun menyiapkan informasi terhadap rekan media jika ada klarifikasi pemberitaan maupun isu yang tersebar namun belum jelas faktanya. Humas Polri akan dengan sangat terbuka menyampaikan informasi sesuai fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Hal tersebut tentunya akan meningkatkan reputasi Polri agar dapat lebih dipercaya baik oleh media maupun masyarakat. Polri memiliki beberapa program kegiatan berkaitan dengan publikasi media massa. Selain itu juga sikap yang dilakukan Humas Polri dengan tidak memberikan uang transportasi kepada setiap rekan media yang ingin meliput kegiatan ataupun menggali pemberitaan terkait Polri merupakan bentuk dari menjaga reputasi. Dengan begitu menurut penulis upaya Humas Polri dalam menjaga reputasi sudah terlaksana dengan baik.

Ketiga, *By supplying good copy* atau memberikan informasi yang baik. Selain pengiriman naskah informasi, strategi *by supplying good copy* ini dapat dilakukan

¹⁸ *Ibid*, hlm. 270.

¹⁹ Rachmat Kriyantono, *Teori-teori Public Relations Perspektif Barat & Lokal*, (Jakarta: Kencana, 2014), hal. 45-46.

dengan cara pengiriman news release yang baik. Dengan demikian terjalin kerjasama yang positif antara *Public Relations* dengan wartawan begitu pula sebaliknya. Hal diatas sesuai dengan salah satu point Ruslan²⁰ yang menyebutkan : pelayanan informasi atau berita (*news service*) adalah pelayanan sebaik-baiknya yang diberikan oleh pihak *public relations* kepada pihak pers/reporter dalam bentuk pemberian informasi, publikasi dan berita baik tertulis, tercetak (*press release, news letter, photo press*), maupun yang terekam (*video release, cassetts recorded, slide film*). Terkait memberikan informasi Humas Polri memberikan naskah informasi kepada wartawan. Misalnya pengadaan gambar atau foto, pembentukan gambar atau foto bagi rekan media. Pada tahap ini juga yaitu memasok naskah informasi yang baik. Misalnya menyediakan naskah yang baik, menarik perhatian, pengadaan gambar atau foto, pembentukan gambar atau foto yang baik. Juga pengiriman news release sehingga hanya sedikit yang memerlukan penulisan ulang. *Press Release* yaitu informasi tertulis yang dikeluarkan oleh suatu lembaga atau organisasi untuk mempublikasikan di media massa. Dengan pemuatan siaran pers, lembaga memperoleh publisitas sehubungan dengan event yang diselenggarakan atau isu yang diangkat Menyusun naskah *press release* merupakan salah satu dari pekerjaan Humas Polri dalam menjalankan kegiatan media relations. *Press release* merupakan siaran berita resmi yang dikeluarkan oleh Humas Polri. *Press release* disebarkan kepada media dengan tujuan untuk mendapatkan publisitas. Selain itu penyampaian *press release* juga ditampilkan pada situs resmi Polri yaitu www.polri.co.id. *Press release* biasanya diberikan kepada media ketika terdapat suatu kegiatan atau kebijakan Polri yang perlu dikomunikasikan kepada masyarakat. Salah satu penerbitan *press release* yang dilaksanakan adalah apabila adanya informasi penting seperti keberhasilan Polri dalam mengungkap kasus-kasus yang beredar di masyarakat. Selain itu *press release* juga diterbitkan untuk mengklarifikasi pemberitaan yang tidak berimbang dan juga untuk pemberitaan yang tidak benar. Humas Polri senantiasa menyediakan gambaran dari informasi yang akan disampaikan baik berupa dokumen-dokumen yang berkaitan berupa foto atau gambar yang bisa di salin secara langsung oleh pihak media. Menurut penulis yang perlu dilakukan Humas Polri yaitu menyediakan naskah informasi dan ketersediaan naskah informasi berupa dokumen-dokumen yang berkaitan maupun foto atau gambar yang bisa disalin secara langsung oleh pihak media.

Keempat, *By cooperationsin providing material* atau kerjasama dalam penyampaian materi informasi. Strategi yang dilakukan dengan kerjasama yang baik. Pada prinsipnya strategi ini adalah strategi yang dibuat untuk menciptakan kerjasama yang baik antara Humas dengan media. Menurut penulis Humas Polri telah melakukan kerjasama yang baik dengan rekan media dalam penyediaan bahan informasi. Penyediaan bahan informasi atau materi tidak hanya saat bertemu secara langsung dengan rekan media tetapi Humas Polri juga memiliki grup di media sosial yaitu WA dengan para wartawan yang menjadi media patner sehingga penyediaan informasi bisa dilakukan di dalam group.

Kelima, *By providing verification facilities* atau menyediakan fasilitas verifikasi. Selain keempat strategi diatas, seorang Humas Polri juga harus memikirkan fasilitas yang harus disediakan bagi pekerja-pekerja media. Humas Polri Selalu memberikan fasilitas kepada wartawan yang ingin mencari berita hal ini dilakukan tidak hanya bersifat formal namun juga di lakukan secara informal. Seperti Humas Polri melakukan pertemuan

²⁰ Ruslan, Rosady, 2007, *Manajemen Public Relations dan Media Komunikasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal. 170.

informal berupa *Coffee morning*. Namun dalam memfasilitasi rekan wartawan Humas masih fokus kepada hal-hal yang bersifat pertukaran informasi, sedangkan bentuk fasilitas yang dibutuhkan wartawan tidak hanya terkait dengan informasi berita, melainkan juga dengan memfasilitasi dalam pelaksanaan teknis sewaktu menggali berita hal tersebut dapat meningkatkan hubungan yang baik antar Humas Polri dan wartawan. Selain itu, humas Polri senantiasa terbuka dalam memfasilitasi wartawan, salah satunya yaitu dengan memberikan waktu bagi wartawan yang masih belum cukup mendapatkan materi atau data terkait pemberitaan yang akan diterbitkan. *Press Tour* Mengajak kalangan wartawan berkunjung ke suatu lokasi, baik yang berada di lingkungannya, maupun ketempat lokasi yang memiliki kaitan dengan kiprah lembaga tersebut, misalnya desa binaan lembaga dan sebagainya. Kegiatan media relations seperti *press tour*, belum terlaksana oleh pihak Polri dikarenakan belum terdapat anggaran yang dapat digunakan. Hal ini dikarenakan setiap program ataupun kegiatan yang dilakukan oleh Polri bergantung pada anggaran pemerintah, sehingga kegiatan *press tour* baru dilaksanakan di tingkatan Polri saja.

Keenam, By building personal relationship with the media atau membangun hubungan personal yang kokoh. Pada setiap kegiatan Humas Polri selalu mengundang rekan-rekan media baik pada acara formal maupun informal, guna untuk menjaga hubungan baik dengan media. Begitupun sebaliknya pada saat rekan media memiliki acara informal selalu mengundang rekan-rekan Humas. Seperti kegiatan *Press luncheon* atau *Media gathering*. Kegiatan *Press luncheon* yaitu mengadakan jamuan makan siang bagi para wakil media massa/wartawan, sehingga pada kesempatan ini pihak pers bisa bertemu dengan top manajemen lembaga guna mendengarkan perkembangan perusahaan atau lembaga tersebut. *Press luncheon* atau dalam istilah lain yang digunakan oleh Polri yaitu *media gathering* merupakan salah satu kegiatan silaturahmi yang bertujuan mempererat hubungan antara institusi Polda dengan para insan pers. Kegiatan ini juga bertujuan meningkatkan sinergi yang lebih baik untuk penyebarluasan kegiatan ataupun hal lainnya oleh Polri dalam rangka sosialisasi mengenai manfaat dan keperluan institusi yang sangat dibutuhkan peran serta media. Hal ini dilakukan demi menjaga hubungan baik antara Humas dan media. Maka menurut penulis Humas Polri perlu membangun hubungan secara personal dengan media.

2. Hambatan Yang Dihadapi Dalam Peningkatan Profesionalisme Kepolisian Republik Indonesia Melalui Pemanfaatan Media Massa

Hambatan Kepolisian Republik Indonesia dalam peningkatan profesionalismenya melalui media massa adalah: a) Terjadi pergeseran jadwal, di mana seharusnya jadwal untuk konferensi pers tetapi terjadi peristiwa nasional yang sedang disorot oleh publik maka pers akan beralih perhatian untuk melakukan peliputan pada peristiwa tersebut; b) Sarana, prasarana dan peralatan yang menunjang tugas humas dan alat komunikasi sangat terbatas; c) Kekurangan Sumber Daya Manusia (SDM); d) Jadwal kegiatan yang sangat padat; e) Anggaran sudah ada ketetapan dari Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri), oleh karena itu diperlukan kemampuan untuk mengelola dan mengembangkan dana tersebut dengan optimal; dan f) Kesulitan dalam menjangkau informasi dari semua Satuan Kerja (Satker) yang jumlahnya banyak.

Hambatan utama yaitu sarana prasarana dan peralatan yang terbatas, kekurangan SDM dan anggaran dana yang sudah ditetapkan oleh Mabes Polri. Upaya peningkatan profesionalisme melalui media massa yang sudah disusun secara sistematis belum tentu akan terhindar dari hambatan-hambatan yang ada. Hambatan-hambatan yang muncul

itu untuk dicarikan solusinya, bukan untuk menghancurkan rencana yang telah disusun. Namun, akan lebih baik lagi apabila sebelum hambatan tersebut muncul sudah ada upaya untuk mengantisipasinya. Beberapa hambatan yang dihadapi seperti yang telah dijelaskan di atas merupakan hambatan yang memang sering dihadapi oleh institusi atau lembaga lainnya. Sejauh ini belum ada hambatan-hambatan khusus yang tidak ada solusinya. Polri tidak menjadikan hambatan sebagai sesuatu yang dapat mengganggu kelancaran dan produktivitas dalam bekerja. Hal ini justru dijadikan sarana untuk mengukur kemampuan tenaga kerja Polri dalam menyelesaikannya. Selanjutnya langkah terbaik yaitu mengoptimalkan dan memanfaatkan semua yang sudah ada.

Upaya-upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia dalam menghadapi hambatan, dapat diuraikan sebagai berikut: (1) Melakukan diskusi untuk membahas mengenai hambatan-hambatan yang ada dan bagaimana solusinya. (2) Mengajukan anggaran untuk bisa dipenuhi sarana prasarannya. (3) Mengajukan kepada pimpinan untuk ditambah personil supaya lengkap. (4) Satu orang merangkap pekerjaan yang lainnya. (5) Menggunakan peralatan sendiri atau milik pribadi. (5) Memaksimalkan segalanya yang ada.

Itulah upaya-upaya yang dilakukan Kepolisian Republik Indonesia dalam menghadapi hambatan-hambatan yang muncul. Upaya-upaya di atas merupakan upaya yang umumnya akan dilakukan oleh setiap institusi atau lembaga ketika mengalami hambatan serupa. Polri tidak bisa memaksakan semuanya yang tertulis dalam upaya-upaya menghadapi hambatan di atas untuk terpenuhi. Sehingga langkah terbaik yaitu Polri berusaha memanfaatkan semuanya yang sudah ada dengan maksimal, baik Sumber Daya Manusia (SDM), sarana prasarana dan sebagainya. Serta tetap fokus dalam mengerjakan semua pekerjaan.

KESIMPULAN

Peningkatan profesionalisme Kepolisian Republik Indonesia melalui pemantapan media massa dapat dilakukan dengan cara membentuk kemitraan dengan berbagai media, membangun reputasi terhadap media, memberikan informasi yang baik, kerjasama dalam penyampaian materi informasi, menyediakan fasilitas verifikasi, kerjasama dalam penyampaian materi informasi.

Hambatan yang dihadapi dalam peningkatan profesionalisme Kepolisian Republik Indonesia melalui pemantapan media massa adalah terjadi pergeseran jadwal, terbatasnya sarana prasarana, kekurangan Sumber Daya Manusia (SDM), padatnyajadwal, minim anggaran, kesulitan dalam menjangkau informasi dari semua Satuan Kerja (Satker) yang jumlahnya banyak.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Ahmad Hadadi, Analisis Pengaruh Profesionalisme Birokrasi dan Pemberian Motivasi Terhadap Kinerja Pegawai Dinas Peikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Barat. 2013.
- [2] Andrew Faull dan Brian Rose, Professionalism and the South African Police Service: What is it and how can it help build safer communities?, Institute for Security Studies, Paper 240, Oktober 2012.
- [3] Ardianto, Elvinaro dkk. 2007, *Komunikasi Massa, Suatu Pengantar, Edisi Revisi*, (Bandung: Simbiosis).
- [4] Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002).
- [5] Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si, 2021, Transformasi Menuju Polri

- Yang Presisi.
- [6] Karlinda Rahma Syahida, *Pembinaan Mental Polri Melalui Pembinaan Mental*, Indo-Islamika, Volume 7 No.1, Januari-Juni 2017, hal. 139-144.
 - [7] Kunarto, *Merenungi Kritik Terhadap Polri*, (Jakarta: Cipta Tunggal, 1995).
 - [8] Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Remaja Rosdakarya, 2010).
 - [9] Petrus Kanisius Noven Manalu, *Fungsi Kode Etik Profesi Polisi Dalam Rangka Meningkatkan Profesionalitas Kinerjanya*, Jurnal, Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta (2014).
 - [10] Rachmat Kriyantono, *Teori-teori Public Relations Perspektif Barat & Lokal*, (Jakarta: Kencana, 2014).
 - [11] Ruslan, Rosady, 2007, *Manajemen Public Relations dan Media Komunikasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
 - [12] Satjipto Raharjo dan Anton Tabah, *Polisi, Pelaku dan Pemikir*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993).
 - [13] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2006).
 - [14] Soleh Soemirat dan Elvinaro Ardianto, *Dasar-dasar Public Relations*, (Bandung : PT. Remaja Rosda karya, 2005).
 - [15] Video Conference Kapolri dan Dengan Kapolda Dan Kapolres Terkait Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) tahun 2021
 - [16] West, Richard dan Lynn H Turner, *Pengantar Teori Komunikasi Edisi 3 Analisis dan Aplikasi*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2008).